

ABSTRAK

Reynaldi Alexandro Monoarfa (01656210021)

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN ATAS HARTA BERSAMA KHUSUSNYA TERKAIT HAK MILIK ATAS TANAH

(xi + 122 halaman; 1 tabel)

Pada saat pasangan suami dan istri melaksanakan perkawinan mereka, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang mereka peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun, hukum perkawinan di Indonesia memperbolehkan adanya pembuatan suatu Perjanjian Perkawinan antara pasangan suami dan istri untuk mengatur pemisahan harta mereka, sehingga harta yang mereka peroleh sejak melaksanakan perkawinan statusnya menjadi terpisah. Hukum perkawinan di Indonesia juga memperbolehkan pelaksanaan Perkawinan Campuran, yakni perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memperoleh Hak Milik atas tanah dan apabila seorang yang berkewarganegaraan asing memperoleh harta berupa Hak Milik atas tanah melalui percampuran harta karena perkawinan, maka ia harus melepaskan haknya tersebut. Dengan dibuatnya suatu Perjanjian Perkawinan, suami dan istri Perkawinan Campuran dapat mengatur kepemilikan harta perkawinan mereka, yang berguna untuk melindungi harta-harta mereka tersebut.

Referensi: 52 (1976-2022)

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran, Hak Milik Atas Tanah

ABSTRACT

Reynaldi Alexandro Monoarfa (01656210021)

LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN CITIZENS WHO CONDUCTED A MIXED MARRIAGE AGAINST COLLECTIVE PROPERTY, ESPECIALLY REGARDING THE RIGHT TO OWN A LAND

(xi + 122 pages; 1 table)

When a husband and wife carry out their marriage, in accordance with the Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the assets they acquire during their marriage become collective property. However, the marriage law in Indonesia allows for the making of a marriage agreement between a husband and wife to regulate the separation of their assets, so that the status of the assets they have acquired since carrying out the marriage becomes separate. Marriage law in Indonesia also allows Mixed Marriages, namely marriages between Indonesian citizens and foreign citizens. In accordance with the provisions of Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Regulation on Agrarian Principles, it is stated that only Indonesian citizens can obtain the right to own a land and if a foreign citizen obtains assets in the form of the right to own a land through a mixture of assets due to marriage, then he must relinquish this right. By making a marriage agreement, the husband and wife of Mixed Marriages can regulate the ownership of their marital assets, which is useful for protecting their assets.

Reference: 52 (1976-2022)

Keywords: Marriage Agreement, Mixed Marriage, The Right to Own